



2023 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PUSAT KEBIJAKAN SARANA
TRANSPORTASI
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusat Kebijakan Sarana Transformasi merupakan salah satu Unit Kerja Pemerintah dibawah Badan Kebijakan Transportasi, Pusat Kebijakan Sarana Transportasi berperan mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan melalui pemberian masukan-masukan berkaitan dengan penetapan kebijakan terkait sarana transportasi pada pimpinan kementerian, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Pemerintah Daerah, BUMN dan instansi terkait lainnya.

Program kerja yang disusun Pusat Kebijakan Sarana Transportasi mengacu pada sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 dan tugas dan fungsi Badan Kebijakan Transportasi sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan serta kebijakan pembangunan perhubungan. Rencana kerja kedepan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pusat Kebijakan Sarana Transportasi yang mengacu pada Renstra Badan Kebijakan Transportasi 2023 – 2024.

Pusat Kebijakan Sarana Transportasi telah melaksanakan sasaran tugas dan fungsi sesuai dengan yang telah direncanakan di Tahun 2023, yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan Pusat Kebijakan Sarana Transportasi berjumlah 13 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi dan 1 Rekomendasi Rumusan NSPK. Disamping itu juga dilaksanakan kegiatan lainnya seperti seminar/focus group discussion (FGD)/webinar, *Agenda Mapping*, koordinasi konsultasi publik dan sosialisasi kebijakan, pelaksanaan penilaian SPIP, penyelenggaraan SAKIP, serta kegiatan penunjang lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas Pencapaian kinerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan pembangunan transportasi sebesar 117,65%.
- b. Realisasi Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan pembangunan transportasi pada (t-2) pada Tahun 2023 ini capaiannya sebesar 105,26%.
- c. Realisasi Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan rumusan NSPK sebesar 117,65%.
- d. Realisasi Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan rumusan NSPK t-2 tidak dapat dinilai. Hal tersebut dikarenakan Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Baru terbentuk pada Agustus 2022, sedangkan t adalah rekomendasi kebijakan pada Tahun 2022, dimana pada tahun 2021 Pusat Kebijakan Sarana Transportasi belum terbentuk.
- e. Presentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselaraskan pada tahun berjalan sebesar 100%.

- f. Indeks tingkat maturitas SPIP Pusat Kebijakan Sarana Transportasi pada Triwulan IV Tahun 2023 sebesar 3 berdasarkan penilaian mandiri SPIP Tahun 2023 sehingga capaian kerjanya adalah 100%.
- g. Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi sebesar 100 sehingga capaian kerjanya adalah 119,05% .
- h. Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi sebesar 100 sehingga capaian kerjanya adalah 113,38% .
- i. Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi sebesar 80,8 sehingga capaian kerjanya adalah 99,75%.
- j. Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi sebesar 100 sehingga capaian kerjanya adalah 131,58% .
- k. Indeks Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi sebesar 100% sehingga capaian kerjanya adalah 116,28%.
- l. Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Pusat Kebijakan Sarana Transportasi sebesar 80,3 sehingga capaian kerjanya adalah 110%.

Realisasi anggaran Triwulan Tahun 2023 sebesar Rp.21.994.905.441,00. Apabila dibandingkan dengan pagu sebesar Rp.22.006.719.000,00 maka capaian daya serap Tahun 2023 sebesar 99,95%. Pada TA 2023 Pusat Kebijakan Sarana Transportasi tidak mengalokasikan belanja modal, sehingga seluruh pagu anggaran yang diusulkan merupakan belanja barang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, atas segala karunia-Nya, karena *Laporan Monitoring Capaian Kinerja* Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Tahun 2023 dapat terselesaikan. Laporan ini menjadi masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pusat Kebijakan Sarana Transportasi.

LKIP disusun sebagai implementasi dari Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang selanjutnya dijabarkan di dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyusunan LKIP. Sistematika pelaporan LKIP disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKIP ini berisikan pendahuluan, perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan kegiatan Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Tahun 2023. Laporan ini sekaligus juga merupakan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pusat Kebijakan Sarana Transportasi serta sebagai pedoman dalam mengambil langkah-langkah kebijakan pada tahun mendatang.

Akhirnya semoga Tuhan YME selalu melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2024

Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi



Capt. Avianto Suratno, S.Pd., M.M.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19651120 199003 1 001

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Fungsi	1
1.3. Organisasi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	2
1.4. Sistematika Pelaporan	4
PERENCANAAN KINERJA.....	5
2.1 Dokumen Rencana Strategis Badan Kebijakan Transportasi	5
2.2 Rencana Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2023	8
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	10
DATA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	14
3.1. Tahapan Pengukuran Kinerja	14
3.2. Pengukuran Capaian Kinerja	15
3.3 Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 terhadap Target PK Tahun 2023 ..	16
3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Triwulan IV Tahun 2023 serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian	18
3.5 Analisis Sumber Daya Keuangan dan Realisasi Anggaran Tahun 2023	28
PENUTUP	30
4.1. Kesimpulan	30
4.2. Saran	32
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN	34
Lampiran 1	35
Lampiran 2	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rencana Kegiatan Pusat Kebijakan Sarana Tahun 2023	9
Tabel 2	Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023-2024	12
Tabel 3	Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	15
Tabel 4	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 dibandingkan	16
Tabel 5	Rincian Target dan Realisasi IKK Triwulan IV Tahun 2023	17
Tabel 6	Rincian Target dan Realisasi IKK 1 dan 2 Tahun 2022	19
Tabel 7	Rincian Target dan Realisasi IKK 3 dan 4 Tahun 2023	20
Tabel 8	Rincian Target dan Realisasi IKK 5 Tahun 2023	21
Tabel 9	Rincian Target dan Realisasi IKK 6 Tahun 2023	22
Tabel 10	Rincian Target dan Realisasi IKK 7 Tahun 2023	23
Tabel 11	Rincian Target dan Realisasi IKK 8 Tahun 2023	23
Tabel 12	Rincian Target dan Realisasi IKK 9 Tahun 2023	24
Tabel 13	Rincian Target dan Realisasi IKK 10 Tahun 2023	26
Tabel 14	Rincian Target dan Realisasi IKK 11 Tahun 2023	26
Tabel 15	Rincian Target dan Realisasi IKK 12 Tahun 2023	27
Tabel 16	Rencana dan Realisasi Anggaran	28
Tabel 17	Rincian Output dan Anggaran IKK Tahun 2023	28
Tabel 18	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 dibandingkan Target	30
Tabel 19	Rencana dan Realisasi Anggaran	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	4
Gambar 2 Peta Strategis Badan Kebijakan Sarana Transportasi	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pusat Kebijakan Sarana Transportasi tahun 2022 disusun sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara. Mulai dari Eselon II keatas harus mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi, pelaksanaan kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Saat ini, seluruh dokumen terkait dengan kinerja pemerintah harus dipertanggungjawabkan yang tertuang dalam SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (selanjutnya disingkat SAKIP) dan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Tugas dan Fungsi

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, pada bagian kesepuluh ditegaskan bahwa tugas Pusat Kebijakan Sarana Transportasi adalah melaksanakan analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang sarana transportasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 627, Pusat Kebijakan Sarana Transportasi menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang sarana transportasi;
2. penyiapan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang sarana transportasi;
3. penyiapan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang sarana transportasi;
4. penyiapan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang sarana transportasi;
5. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang sarana transportasi;
6. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang sarana transportasi;
7. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

1.3. Organisasi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi

Untuk menunjang tugas dan fungsi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi sesuai dengan PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, telah ditetapkan susunan Organisasi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi berserta fungsinya sebagai berikut:

1. Bidang Kebijakan Sarana Transportasi Jalan dan Perkeretaapian;

a. Tugas

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, serta pengelolaan manajemen pengetahuan di bidang sarana transportasi jalan dan perkeretaapian.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 630, Bidang Kebijakan Sarana Transportasi Jalan dan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang sarana transportasi jalan dan perkeretaapian;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang sarana transportasi jalan dan perkeretaapian;
- 3) penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang sarana transportasi jalan dan perkeretaapian;
- 4) penyiapan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang sarana transportasi jalan dan perkeretaapian;
- 5) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang sarana transportasi jalan dan perkeretaapian; dan
- 6) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang sarana transportasi jalan dan perkeretaapian.

Bidang Kebijakan Sarana Transportasi Jalan dan Perkeretaapian terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bidang Kebijakan Sarana Transportasi Pelayaran dan Penerbangan

a. Tugas

Bidang Kebijakan Sarana Transportasi Pelayaran dan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, serta pengelolaan manajemen pengetahuan di bidang sarana transportasi pelayaran dan penerbangan.

b. Fungsi

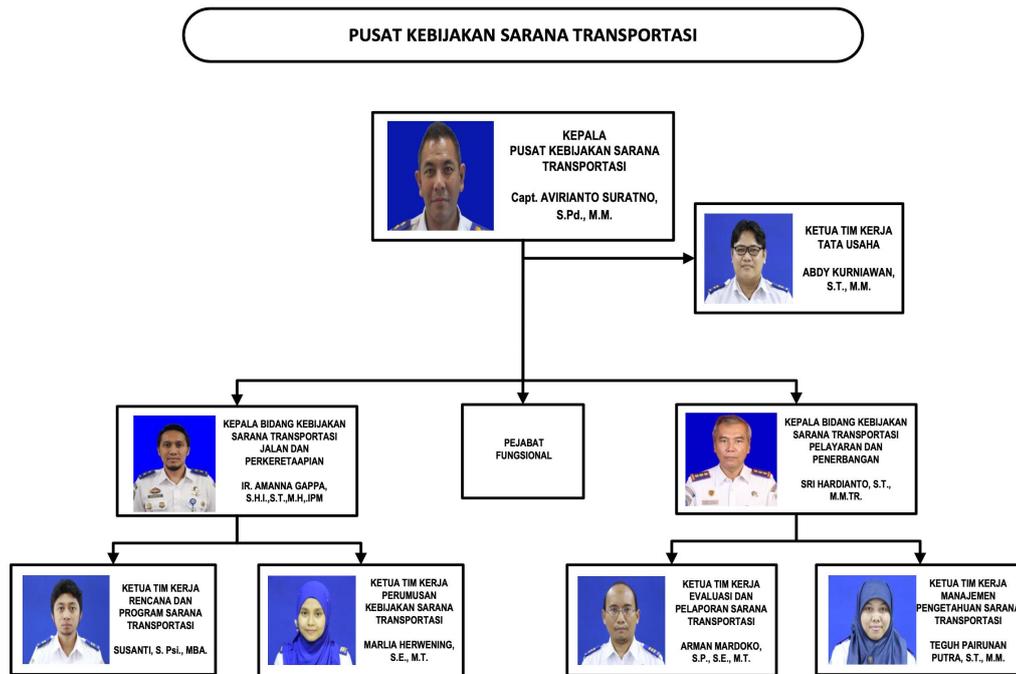
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633, Bidang Kebijakan Sarana Transportasi Pelayaran dan Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang sarana transportasi pelayaran dan penerbangan;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang sarana transportasi pelayaran dan penerbangan;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang sarana transportasi pelayaran dan penerbangan;
- 4) Penyiapan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang sarana transportasi pelayaran dan penerbangan;
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang sarana transportasi pelayaran dan penerbangan; dan
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang sarana transportasi pelayaran dan penerbangan.

Bidang Kebijakan Sarana Transportasi Pelayaran dan Penerbangan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan struktural organisasi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi yang ada sekarang, komposisi jabatan struktural terdiri dari 1 orang Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi (eselon II), 2 orang eselon III, dan Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi sesuai dengan PM No. 17 Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Struktur Organisasi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Berdasarkan PM 17 Tahun 2022

1.4. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menyajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi organisasi
2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2023 uraian mengenai pengukuran kinerja organisasi
3. Bab III Data Dan Analisis Capaian Kinerja
 - a. Tahapan Pengukuran Kinerja
 - b. Pengukuran Capaian Kinerja
 - c. Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Target PK Tahun 2023
 - d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Tahun 2023 serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian
 - e. Analisis Sumber Daya Keuangan
 - f. Capaian Keberhasilan Kinerja Lainnya
 - g. Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2023
4. Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Dokumen Rencana Strategis Badan Kebijakan Transportasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan, Badan Litbang Perhubungan telah bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Transportasi. Selain itu, terdapat pula peraturan turunan yang mengatur susunan organisasi dan tata kerjanya sebagai dasar transformasi kelembagaan yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang ditetapkan pada 24 Agustus 2022. Kepala Badan Kebijakan Transportasi telah menetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator kinerja Kegiatan (IKK) di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi tahun 2022–2024 yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kebijakan Transportasi Nomor KP-BKT 109/2022. Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator kinerja Kegiatan (IKK) yang tertuang dalam surat keputusan tersebut akan dijadikan dasar pengukuran capaian kinerja Badan Kebijakan Transportasi.

Dengan mendasarkan hal tersebut Visi dan Misi Badan Kebijakan Transportasi telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan Tujuan dan Sasaran Program Badan Kebijakan Transportasi pada tahun 2023-2024. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis sektor transportasi dan permasalahan yang ada. Visi Badan Kebijakan Transportasi adalah Badan Kebijakan Transportasi (BKT) sebagai pusat unggulan (center of excellence) yang terpercaya dalam analisis dan rekomendasi perumusan kebijakan transportasi yang secara cepat, akurat, dan manfaat guna mendukung terwujudnya Visi Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

Sedangkan Misi Badan Kebijakan Transportasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan harmonisasi kebijakan transportasi secara holistik, integratif, tematik, spasial (HITS)
2. Meningkatkan kualitas rumusan kebijakan transportasi melalui proses analisis dan penyusunan rekomendasi yang berbasis bukti dan ilmu pengetahuan (evidence and knowledge based policy)
3. Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam proses analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi
4. Membangun bisnis proses yang efektif dalam perumusan kebijakan di bidang transportasi

5. Penguatan SDM, sarana, prasarana/na, pendanaan, database, dan kelembagaan dengan dukungan kinerja perencanaan, program, dan penganggaran serta kualitas tata kelola yang efektif dan efisien.

Sedangkan Visi dan Misi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi sesuai Renstra Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Tahun 2023-2024 adalah sebagai berikut.

Visi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi adalah Pusat Kebijakan Sarana Transportasi yang berupaya mewujudkan kebijakan yang berkualitas di bidang sarana transportasi guna mendukung terwujudnya visi Badan Kebijakan Transportasi (BKT) sebagai pusat unggulan (*center of excellence*) yang terpercaya dalam analisis dan rekomendasi perumusan kebijakan transportasi yang secara cepat, akurat, dan manfaat.

Misi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan harmonisasi kebijakan di bidang sarana transportasi secara holistik, integratif, tematik, spasial (HITS)
2. Meningkatkan kualitas rumusan kebijakan di bidang sarana transportasi melalui proses analisis dan penyusunan rekomendasi yang berbasis bukti dan ilmu pengetahuan (*evidence and knowledge based policy*)
3. Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam proses analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang sarana transportasi
4. Membangun bisnis proses yang efektif dalam perumusan kebijakan di bidang sarana transportasi
5. Penguatan SDM, sarana, prasarana, pendanaan, database, dan kelembagaan dengan dukungan kinerja perencanaan, program, dan penganggaran serta kualitas tata kelola yang efektif dan efisien

Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari Misi Badan Kebijakan Transportasi dengan memperhatikan Visi. Untuk mewujudkan Misi Badan Kebijakan Transportasi, maka Tujuan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023-2024 adalah sebagai berikut:

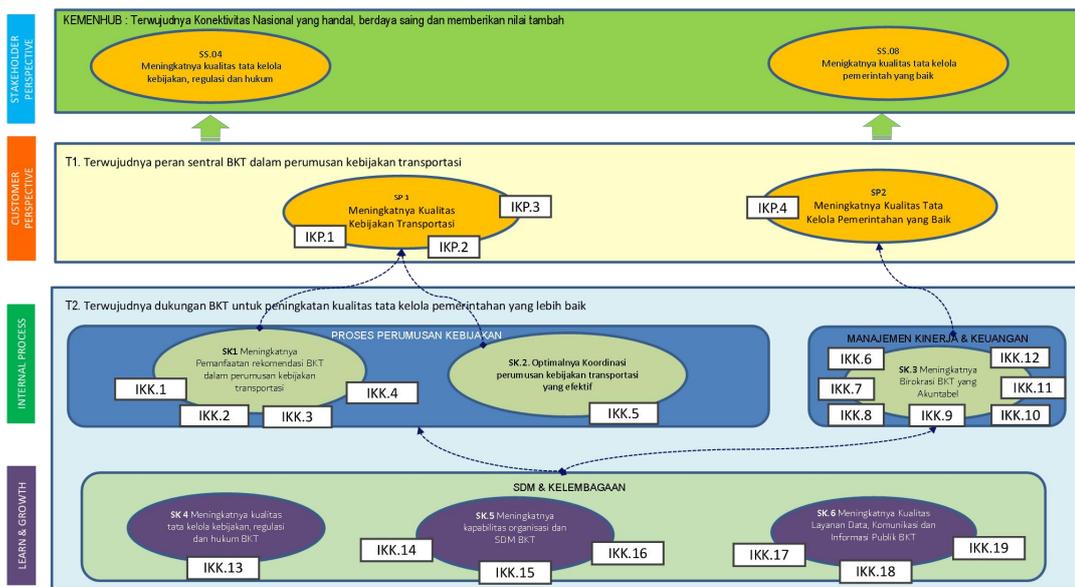
1. Terwujudnya peran sentral Badan Kebijakan Transportasi dalam perumusan kebijakan transportasi.
2. Terwujudnya dukungan Badan Kebijakan Transportasi untuk peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan yang lebih baik.

Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Badan Kebijakan Transportasi tahun 2023-2024 disusun sebagai indikator *outcome* dan bukan merupakan indikator output Badan Kebijakan Transportasi. Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya indeks kualitas kebijakan (IKK) Kementerian Perhubungan;
2. Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi BKT dalam perumusan kebijakan transportasi;

3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penunjang perumusan kebijakan transportasi;
4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran Program Badan Kebijakan Transportasi merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome* dari beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Sasaran Program ini dirumuskan dari Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan, Visi, Misi, dan Tujuan Badan Kebijakan Transportasi serta memperhatikan permasalahan dan rencana capaian pada tahun 2023-2024. Penjabaran menggunakan pendekatan metode *balanced scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal proses perspective* dan *learning and growth perspective* sebagai berikut:



Gambar 2 Peta Strategis Badan Kebijakan Sarana Transportasi

Adapun Sasaran Program Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023-2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sasaran Program Pertama (SP.1) yang akan dicapai adalah Meningkatnya Kualitas Kebijakan Transportasi;
- b. Sasaran Program Kedua (SP.2) yang akan dicapai adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;

Dalam tataran *internal process perspective* di level unit eselon II, khususnya Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, Sasaran Kegiatan (SK) sebagai berikut:

- a. Sasaran Kegiatan Pertama (SK.1) yang akan dicapai adalah Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi dalam Perumusan Kebijakan Transportasi, dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu sebagai berikut:

- 1) IKK 1 : Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Sarana Transportasi (tahun berjalan)
 - 2) IKK 2 : Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Sarana Transportasi (t-2)
 - 3) IKK 3 : Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK Bidang Sarana Transportasi (tahun berjalan)
 - 4) IKK 4 : Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK Bidang Sarana Transportasi (t-2)
- b. Sasaran Kegiatan Kedua (SK.2) yang akan dicapai adalah Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan di Bidang Sarana Transportasi yang Efektif, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:
- 1) IKK 5 : Perumusan Kebijakan di Bidang Sarana Transportasi yang Diselaraskan Pada Tahun Berjalan.
- c. Sasaran Kegiatan Kedua (SK.2) yang akan dicapai Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan di Bidang Sarana Transportasi yang Efektif, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut
- 1) IKK.6 : Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi
 - 2) IKK 7 : Indeks Perencanaan Pusat Kebijakan Sarana Transportasi
 - 3) IKK 8 : Indeks Pengelolaan Keuangan Pusat Kebijakan Sarana Transportasi
 - 4) IKK 9 : Nilai SAKIP Pusat Kebijakan Sarana Transportasi
 - 5) IKK 10 : Indeks Pengelolaan BMN Pusat Kebijakan Sarana Transportasi
 - 6) IKK 11 : Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Pusat Kebijakan Sarana Transportasi
 - 7) IKK 12 : Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Pusat Kebijakan Sarana Transportasi

2.2 Rencana Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2023

Setiap kegiatan yang diuraikan dalam KRO dan RO memiliki korelasi dengan sasaran program Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023-2024. Sasaran program pertama yaitu Meningkatkan Kualitas Kebijakan Transportasi dan sasaran program kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik diuraikan menjadi kegiatan yang terklasifikasi dalam KRO Kebijakan Bidang Sarana. Rincian korelasi antara sasaran program dan restrukturisasi program Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 1 Rencana Kegiatan Pusat Kebijakan Sarana Tahun 2023

Kode	Kegiatan/Subkegiatan/Jenis Belanja/ Rincian Belanja
022.11.GA	PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIFITAS
6891	Formulasi Kebijakan Transportasi
6891.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana
6891.ABF.051	Rumusan NSPK Transportasi
103	Bidang Pelayaran
B	Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Industri Perkapalan Nasional
6891.ABF.052	Kebijakan Pembangunan Transportasi
101	Bidang Sarana Transportasi
A	Perumusan Kebijakan Pembukaan AMO Berbasis Potential Demand dan Mekanisme Mutual Recognition Arrangement
B	Perumusan Kebijakan Evaluasi Kinerja Pelabuhan Patimban
C	Perumusan Kebijakan Strategi Indonesia dalam Menghadapi Pra Audit IMO/IMSAS
D	Perumusan Kebijakan Optimalisasi Trayek Tol Laut dengan Konsep Hub and Spoke
E	Perumusan Kebijakan Pemeriksaan Sarana Perkeretaapian Uji Tak Rusak (Non Destructive Testing)
F	Analisa Kebijakan Bidang Sarana Transportasi
G	Direktif Menteri Perhubungan Bidang Sarana Transportasi
H	Perumusan Kebijakan Penataan Fasilitas Pelayanan Untuk Kapal Roro Kargo, Kapal Pelayaran Rakyat dan Kapal Negara di Pelabuhan Labuan Bajo
6891.PBF.051	Sistem Transportasi Ibukota Nusantara
101	Bidang Sarana Transportasi
A	Perumusan Kebijakan Rencana Implementasi Autonomous Rail Rapid Transit (ART) di IKN
B	Perumusan Kebijakan Mekanisme Insentif Bagi Airline Dalam Penggunaan SAF (Sustainable Aviation Fuel)
6891.PBF.056	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan
101	Bidang Sarana Transportasi
A	Perumusan Kebijakan Terkait Angkutan Massal Pada Kawasan Aglomerasi di Indonesia
4662.AEA	Koordinasi
4662.AEA.051	Rancangan Kebijakan yang dikonsolidasikan
101	Bidang Sarana Transportasi
A	Koordinasi Perencanaan Strategis dan Pemetaan Isu/Agenda Mapping
B	Penyelenggaraan Konsultasi Publik dan Sosialisasi Kebijakan
C	Dukungan Harmonisasi Rancangan Kebijakan
D	Pendampingan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Implementasi kebijakan
E	Peningkatan Kendali Mutu Analisa Kebijakan
022.11.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Kode	Kegiatan/Subkegiatan/Jenis Belanja/ Rincian Belanja
4652	Pengelolaan Organisasi dan SDM Perumus Kebijakan
4652.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
4652.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
101	Administrasi Pengelolaan SDM
A	Administrasi Pengelolaan Ketatausahaan, Umum dan SDM Penunjang Teknis
4653	Perencanaan Keuangan, BMN dan Umum Perumus Kebijakan
4653.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
4653.EBA.956	Layanan BMN
101	Administrasi BMN
A	Administrasi Satuan Kerja, Keuangan, dan Pengelolaan
4653.EBA.962	Layanan Umum
101	Administrasi Perlengkapan dan Kerumahtanggan
A	Pencegahan Penyebaran Covid-19
4653.EBA.994	Layanan Perkantoran
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
4653.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran
103	Administrasi Penyusunan Program
A	Koordinasi Penyusunan Program, Rencana Anggaran, dan Rencana Kinerja Tahunan Bidang Kebijakan Sarana Transportasi
B	Rencana Strategis Transportasi Bidang Sarana
4653.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi
101	Administrasi Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan
A	Penyelenggaraan SAKIP Bidang Sarana Transportasi
B	"Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Internal

Sumber : RKAKL Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Tahun 2023

Pagu Anggaran Pusat Kebijakan Sarana Transportasi untuk Tahun 2023 sebesar Rp.22.006.719.000,00 (Dua Puluh Dua Miliar Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan pengesahan dari Rencana Kerja Tahunan (*Annual Performance Plan*) sebagai penjabaran rencana strategis yang memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun dengan sejumlah Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicators*) yang relevan. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode satu tahun kedepan.

Penetapan kinerja merupakan syarat dalam penyusunan SAKIP yang akan digunakan oleh para pejabat dalam mengelola dan meningkatkan kinerja organisasinya. Rencana Kinerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi merupakan butir-butir kesepakatan kinerja atau persetujuan kinerja (*performance agreement*)

ataupun *Service Agreement* dan merupakan dokumen "Kontrak" antara pimpinan unit organisasi (Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi) dengan pimpinan Badan Kebijakan Transportasi.

Rencana Strategis Badan Kebijakan Transportasi tahun 2023 – 2024 telah tersusun, sehingga dokumen perjanjian kinerja disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023-2024, Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Kebijakan Sarana Transportasi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023-2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	META INDIKATOR	TARGET	
						2023	2024
SK 1	Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi BKT dalam Perumusan Kebijakan Transportasi	IKK 1	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (tahun berjalan)	%	Prosentase rekomendasi kebijakan pembangunan transportasi yang diterima oleh Menteri Perhubungan/sub sektor / stakeholder pada tahun berjalan	85	90
		IKK 2	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (t-2)	%	Prosentase rekomendasi kebijakan pembangunan transportasi yang dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan/sub sektor / stakeholder pada (t-2)	38	39
		IKK 3	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (tahun berjalan)	%	Prosentase rekomendasi rumusan NSPK yang dihasilkan Pusat Kebijakan Transportasi pada tahun berjalan	85	90
		IKK 4	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (t-2)	%	Prosentase realisasi NSPK yang dimanfaatkan pada t-2	32	32
SK 2	Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Transportasi yang Efektif	IKK 5	Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselaraskan pada tahun berjalan	%	Prosentase penyelenggaraan koordinasi perumusan kebijakan transportasi yang efektif pada tahun berjalan	100	100
SK 3	Meningkatnya Birokrasi BKT yang Akuntabel	IKK 6	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	Penilaian BPKP	3	3
		IKK 7	Indeks Perencanaan BKT	Indeks	Penilaian tingkat kesesuaian dan keterpaduan dilakukan berdasarkan aspek Integrasi Perencanaan	84	85
		IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan BKT	Indeks	Kinerja Anggaran dengan bobot 60% dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40%	88,2	90,2
		IKK 9	Nilai SAKIP BKT	Nilai	Penilaian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Permen PANRB No. 88 Tahun 2021	81	82

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	META INDIKATOR	TARGET	
						2023	2024
		IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN BKT	Indeks	Tingkat pencapaian BMN yang dilakukan Penetapan Status Penggunaannya (PSP) (50%) dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan terkait BMN (50%)	76	77
		IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BKT	%	Prosentase Jumlah tindak lanjut perjanjian kerjasama	86	87
		IKK 8	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	Pengukuran kualitas penyelenggaraan ketatausahaan perkantoran Badan Kebijakan Transportasi	73	74

Sumber: Dokumen Rencana Strategis Pusat Kebijakan Sarana Transportasi 2023-2024

BAB III

DATA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan pencapaian kinerja suatu organisasi melalui upaya-upaya strategis dan operasional yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam rangka pemenuhan visi dan misinya. Akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan atau sebaliknya menjadi kegagalan suatu organisasi. Penilaian akuntabilitas kinerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi dilakukan melalui pengukuran terhadap capaian kinerja setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran tertentu dengan cara membandingkan realisasi yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang telah direvisi.

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran. Pengukuran Kinerja diawali dengan identifikasi capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang terbaru dari Perjanjian Kinerja Revisi Ketiga yang diukur tiap bulan, triwulan maupun tahunan.

Tahapan pengukuran kinerja saat ini dilakukan menggunakan sistem aplikasi berbasis web, yakni *e-performance* dengan alamat <http://eperformance.dephub.go.id>. Aplikasi ini disediakan oleh Kementerian Perhubungan sebagai bentuk monitoring kinerja yang dapat dimanfaatkan oleh setiap unit kerja Eselon I, II, III mandiri di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pemanfaatan aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah proses evaluasi capaian target kinerja secara periodik setiap bulannya.

Sebagai upaya peningkatan kinerja evaluasi dan monitoring capaian target realisasi, Pusat Kebijakan Sarana Transportasi menyusun Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan perbulan. Laporan Rencana Aksi Kinerja disusun dalam bentuk kertas kerja yang berisikan format tabel target dan realisasi kinerja yang dilengkapi dengan evaluasi dan rencana tindak lanjut yang disusun setiap bulannya. Disamping itu, disusun juga laporan evaluasi terhadap program kegiatan yang diukur setiap triwulan sebagai bentuk monitoring kinerja target dan realisasi anggaran.

Monitoring capaian kinerja *output* kegiatan dan anggaran dalam hal ini juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dengan alamat <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id> dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan aplikasi e-Monev PP 39 dengan alamat <http://emonev.bappenas.go.id>.

3.2. Pengukuran Capaian Kinerja

Capaian kinerja Badan Kebijakan Transportasi dilihat berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang diukur dengan menggunakan indikator masing-masing sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023-2024 dan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target rencana dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif.

Pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap Indikator Kinerja Kegiatan dituangkan didalam manual IKK untuk panduan menghitung capaian kinerja, yang mencakup tentang pengertian, kriteria dan formula. Berikut disampaikan target Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Tahun 2023.

Tabel 3 Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET
IKK 1	Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan pembangunan transportasi	%	85
IKK 2	Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan pembangunan transportasi (t-2)	%	38
IKK 3	Persentase pemanfaatan rekomendasi rumusan NSPK	%	85
IKK 4	Persentase pemanfaatan rekomendasi rumusan NSPK (t-2)	%	32
IKK 5	Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang di selaraskan pada tahun berjalan	%	100
IKK 6	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3
IKK 7	Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	84
IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	88,2
IKK 9	Nilai SAKIP BKT	Nilai	81
IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	76
IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi	%	86

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET
IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	73

Sumber : Rencana Strategis Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, 2023

3.3 Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Target PK Tahun 2023

Pusat Kebijakan Sarana Transportasi telah rampung menyelesaikan kinerjanya di Tahun 2023. Kinerja di Tahun 2023 dapat dilaksanakan secara optimal. Berikut disampaikan capaian kinerja Tahun 2023 dalam tabel berikut.

Tabel 4 Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target PK Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)	
IKK 1	Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan pembangunan transportasi	%	85	100	117,65%
IKK 2	Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan pembangunan transportasi (t-2)	%	38	40	105,26%
IKK 3	Persentase pemanfaatan rekomendasi rumusan NSPK	%	85	100	117,65%
IKK 4	Persentase pemanfaatan rekomendasi rumusan NSPK (t-2)	%	32	-	NA
IKK 5	Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang di selaraskan pada tahun berjalan	%	100	100	100%
IKK 6	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3	3	100%
IKK 7	Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	84	100	119,05%
IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	88,2	100	113,28%
IKK 9	Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi	Nilai	81	80,8	99,75%
IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	76	100	131,58%
IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan	%	86	100	116,28%

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
	Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi				
IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	73	80,3	110%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)					111,86%

Sumber : Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, Diolah, 2023

Secara rinci, target dan realisasi dari output per IKK perbulan pada Tahun 2023 disampaikan pada Tabel 5 sebagai berikut,

Tabel 5 Rincian Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan	TARGET			REALISASI		
			Okt	Nov	Des	Okt	Nov	Des
IKK 1	Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan pembangunan transportasi	%	75	80	85	52,5	76,3	100
IKK 2	Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan pembangunan transportasi (t-2)	%	25	30	38	10	10	40
IKK 3	Persentase pemanfaatan rekomendasi rumusan NSPK	%	75	80	85	85	85	100
IKK 4	Persentase pemanfaatan rekomendasi rumusan NSPK (t-2)	%	-	-	-	-	-	-
IKK 5	Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang di selaraskan pada tahun berjalan	%	75	85	100	77	77	100
IKK 6	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3	3	3	3	3	3
IKK 7	Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	84	84	84	100	100	100
IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	73,5	80,85	88,2	54,6	62,66	88,91
IKK 9	Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi	Nilai	81	81	81	80,8	80,8	80,8

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan	TARGET			REALISASI		
			Okt	Nov	Des	Okt	Nov	Des
IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	63,3	69,67	76	100	100	100
IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi	%	86	86	86	100	100	100
IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	73	73	73	80,3	80,3	78,94

Sumber : Pusjak Sarana Transportasi, Diolah, 2023

3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Tahun 2023 serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian

Pada Tahun 2023 Pusat Kebijakan Sarana Transportasi telah melaksanakan kegiatan kegiatan yang telah direncanakan, Pusat Kebijakan Sarana Transportasi yang baru terbentuk membuat masih perlunya penyesuaian baik secara organisasi maupun proses kerja oleh seluruh pegawai Pusat Kebijakan Sarana Transportasi. Perubahan organisasi membuat cara kerja dan fokus kegiatan perlu disesuaikan dengan arah visi dan misi dari Badan Kebijakan Transportasi sehingga banyak tahapan serta SOP pekerjaan yang perlu disesuaikan. Uraian penjelasan realisasi kinerja setiap IKK akan dijelaskan sebagai berikut:

3.4.1 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi

IKK 1 dan 2 merupakan capaian penyusunan rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 (initial) dan 2021 (intermediate). Capaian IKK 1 dan 2 sampai akhir Tahun 2023 sebesar 117,65% dan 105,26%. Realisasi kegiatan pada IKK 1 dan IKK 2 telah melebihi dari target yang telah ditentukan, sebanyak 13 rekomendasi kebijakan serta 4 monitoring kemanfaatan kajian rekomendasi kebijakan berhasil diselesaikan di Tahun 2023, hal inilah yang membuat capaian kinerja IKK 1 dan IKK 2 di Tahun 2023 ini lebih dari 100%.

Tabel 6 Rincian Target dan Realisasi IKK 1 dan 2 Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan	TARGET			REALISASI		
			Okt	Nov	Des	Okt	Nov	Des
IKK 1	Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan pembangunan transportasi	%	75	80	85	52,5	76,3	100
IKK 2	Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan pembangunan transportasi (t-2)	%	25	30	38	10	10	40

Sumber : Pusjak Sarana Transportasi, Diolah, 2023

Berikut penjelasan pencapaian target IKK 1 dan IKK 2 Tahun 2023 Pusat Kebijakan Sarana Transportasi.

1. Pusat Kebijakan Sarana Transportasi memiliki 13 Judul Rekomendasi Kebijakan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023. Judul rekomendasi kebijakan di maksud adalah sebagai berikut :
 - a. Perumusan Kebijakan Pembukaan AMO Berbasis Potential Demand dan Mekanisme Mutual Recognition Arrangement .
 - b. Perumusan Kebijakan Evaluasi Kinerja Pelabuhan Patimban,
 - c. Perumusan Kebijakan Strategi Indonesia dalam Menghadapi Pra Audit IMO/IMSAS.
 - d. Perumusan Kebijakan Optimalisasi Trayek Tol Laut dengan Konsep Hub and Spoke.
 - e. Menggali Potensi Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) di Sektor Transportasi.
 - f. Evaluasi Program Tol Laut di Wilayah 3TP.
 - g. Evaluasi Angkutan Perintis Kinerja Pelayanan Angkutan Perintis di Sulawesi Utara.
 - h. Evaluasi Angkutan Penyeberangan Ketapang – Gilimanuk.
 - i. Implementasi Lashing Untuk Kapal Penyeberangan.
 - j. Perumusan Kebijakan Rencana Implementasi Autonomous Rail Rapid Transit (ART) di IKN.
 - k. Perumusan Kebijakan Mekanisme Insentif Bagi Airline Dalam Penggunaan SAF (Sustainable Aviation Fuel).
 - l. Perumusan Kebijakan Terkait Angkutan Massal Pada Kawasan Aglomerasi di Indonesia.
 - m. Perumusan Kebijakan Penataan Fasilitas Pelayanan untuk Kapal Ro-Ro Kargo, Kapal Pelayaran, dan Kapal Negara di Pelabuhan Labuan Bajo.

Rekomendasi kebijakan Pusat Kebijakan Sarana Transportasi (Puslitbang LSDP) Tahun 2021 yang telah di monitoring kemanfaatannya adalah sebagai berikut :

- a. Studi Potensi Pengoperasian dan Desain Floating Wharf Barge sebagai Infrastruktur Penunjang Ibu Kota Negara, Kajian ini telah dimanfaatkan pada tahun 2021 sebagai bahan referensi dalam pengajaran pada Program Studi Teknik Kelautan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin berdasarkan surat Ketua Departemen Teknik Kelautan Fakultas Teknik Unhas Nomor 159/UN4.7.7/KP.02.00/2022 Tanggal 4 Januari 2022.
- b. Evaluasi dan Optimasi Rute Tol Laut (Kebijakan dan Model Pengelolaan)
- c. Realokasi Kapal Penyeberangan ke Wilayah Lintasan Penyeberangan ke Indonesia Bagian Timur
- d. Potensi Pengoperasian Floating Storage Barge Sebagai Infrastruktur Penunjang Wilayah Terluar, Terdepan, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP)

3.4.2 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK Bidang Sarana Transportasi

IKK 3 dan 4 merupakan capaian penyusunan rekomendasi rumusan NSPK yang dilaksanakan pada Tahun 2023 (initial) dan 2021 (intermediate). Capaian IKK 3 dan 4 pada Tahun 2023 sebesar 117,65% dan NA. Capaian untuk IKK 3 pada Tahun 2023 telah sesuai target yang telah di tetapkan. Sedangkan capaian IKK 4 pada Tahun 2023 belum dapat dilakukan perhitungan karena baru terbentuknya Pusat Kebijakan Sarana Transportasi pada Tahun 2022, sehingga belum ada rekomendasi rumusan NSPK yang dihasilkan oleh Pusat Kebijakan Sarana Transportasi pada t-2 atau Tahun 2021.

Tabel 7 Rincian Target dan Realisasi IKK 3 dan 4 Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan	TARGET			REALISASI		
			Okt	Nov	Des	Okt	Nov	Des
IKK 3	Persentase pemanfaatan rekomendasi rumusan NSPK	%	75	80	85	85	85	100
IKK 4	Persentase pemanfaatan rekomendasi rumusan NSPK (t-2)	%	-	-	-	-	-	-

Sumber : Pusjak Sarana Transportasi, Diolah, 2023

Pusat Kebijakan Sarana Transportasi memiliki 1 Judul Rekomendasi Rumusan NSPK yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023.

Judul tersebut adalah Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Industri Perkapalan Nasional.

3.4.3 Presentase Perumusan Kebijakan di Bidang Sarana Transportasi yang Diselaraskan Pada Tahun Berjalan

IKK 5 merupakan Presentase penyelenggaraan koordinasi perumusan kebijakan transportasi yang efektif pada tahun berjalan. Terdapat 3 aspek dalam penilaian presentase perumusan kebijakan IKK 5, 3 aspek di maksud adlah sebagai berikut :

1. Koordinasi perencanaan (a)

Koordinasi perencanaan kebijakan & pemetaan isu strategis; dilakukan minimal 2 kali setahun bersama dengan stakeholder terkait (agenda mapping dilaksanakan per semester).

2. Koordinasi pelaksanaan (b)

Koordinasi pelaksanaan kebijakan, mencakup kegiatan konsultasi publik, harmonisasi rancangan kebijakan & sosialisasi kebijakan, dilakukan minimal 5 kali setahun bersama dengan stakeholder terkait (2x konsultasi publik dan sosialisasi rancangan kebijakan) (3 kali harmonisasi rancangan regulasi per 4 bulan yang telah siap ditetapkan)

3. Koordinasi monitoring evaluasi (c)

Koordinasi monitoring, kendali mutu & evaluasi implementasi kebijakan, dilakukan minimal 2 kali setahun, sebagai monitoring dan evaluasi saat rumusan kebijakan telah di deliver (diawal dan akhir tahun)

Tabel 8 Rincian Target dan Realisasi IKK 5 Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan	TARGET			REALISASI		
			Okt	Nov	Des	Okt	Nov	Des
IKK 5	Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang di selaraskan pada tahun berjalan	%	75	85	100	77	77	100

Sumber : Pusjak Sarana Transportasi, Diolah, 2023

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan 4 kegiatan Agenda Mapping yaitu Agenda Mapping di Bali, Medan, Kendari, dan Balikpapan. Selain itu telah dilaksanakan juga kegiatan sosialisasi kebijakan di 2 Lokasi yakni di Banyuwangi, Jawa Timur dan Cianjur, Jawa Barat. Serta telah dilaksanakan kegiatan Advokasi Kebijakan di 3 lokasi yakni Batam, Surabaya dan Yogyakarta.

3.4.4 Tingkat Maturitas SPIP

Pada tahun 2023, berdasarkan hasil penilaian Penjamin Kualitas Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Perhubungan, Kementerian Perhubungan berhasil mempertahankan nilai SPIP dengan indeks 3 atau terdefinisi sesuai surat Direktur BPKP Nomor PE.09.03/LHP-170/D103/2/2023 Tanggal 13 November 2023.

Tabel 9 Rincian Target dan Realisasi IKK 6 Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan	TARGET			REALISASI		
			Okt	Nov	Des	Okt	Nov	Des
IKK 6	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Nilai	3	3	3	3	3	3

Sumber : Pusjak Sarana Transportasi, Diolah, 2023

Berdasarkan hasil Evaluasi SPIP Tahun 2023, telah dilaksanakan upaya perbaikan seperti :

1. Telah dilaksanakan Kick off Meeting Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023.
2. Telah dilaksanakan Bimtek SPIP Terintegrasi Tahun 2023.
3. Persiapan Penyusunan Penilaian Risiko di Lingkungan Pusat Kebijakan Sarana Transportasi.
4. Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko dan Data Dukung Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Tahun 2023.

3.4.5 Indeks Perencanaan Pusat Kebijakan Sarana Transportasi

Tingkat kesesuaian dan keterpaduan kebijakan perencanaan dan pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang perhubungan merupakan penilaian terhadap aspek kemanfaatan dokumen perencanaan yang terpadu berdasarkan kesesuaian antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, baik lingkup nasional maupun bidang untuk menghindari terjadinya duplikasi dan ketidaksesuaian antara perencanaan, pemrograman dan penganggaran.

Indikator untuk menilai kualitas perencanaan di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi Perhubungan, antara lain sebagai berikut:

1. Persentase Kesesuaian sasaran program renstra Unit Kerja Eselon 2 dengan sasaran Badan Kebijakan Transportasi (minimal 1 kali dalam 5 tahun) dengan bobot 20%;
2. Persentase Kesesuaian sasaran program Renja Unit Kerja Eselon 2 dengan sasaran PN, dalam RKP dengan bobot 40%;
3. Persentase Kesesuaian sasaran program Renja Unit Kerja Eselon 2 dengan sasaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.

Tabel 10 Rincian Target dan Realisasi IKK 7 Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan	TARGET			REALISASI		
			Okt	Nov	Des	Okt	Nov	Des
IKK 7	Indeks Perencanaan Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	Nilai	84	84	84	100	100	100

Sumber : Pusjak Sarana Transportasi, Diolah, 2023

Nilai Indeks Perencanaan Pusat Kebijakan Sarana Transportasi mengikuti Nilai Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi dengan Nilai Indeks pada Tahun 2023 sebesar 100.

3.4.6 Indeks Pengelolaan Keuangan Pusat Kebijakan Sarana Transportasi

Mengadopsi dari Permendagri No.19 Tahun 2020, Pasal 1, Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata Kelola keuangan di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu.

Indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi Perhubungan, antara lain sebagai berikut:

1. Kinerja anggaran dengan bobot 60%;
2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40%.

Tabel 11 Rincian Target dan Realisasi IKK 8 Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan	TARGET			REALISASI		
			Okt	Nov	Des	Okt	Nov	Des
IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	Nilai	73,5	80,85	88,2	54,6	62,66	88,91

Sumber : Pusjak Sarana Transportasi, Diolah, 2023

Pada Tahun 2023 Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Transportasi adalah 51,132 sedangkan nilai dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan Kebijakan Transportasi adalah 37,784, sehingga Indeks Pengelolaan Keuangan sebesar 88,916.

3.4.7 Nilai SAKIP Pusat Kebijakan Sarana Transportasi

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result-oriented government).

Penilaian dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB setiap satu tahun sekali atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 dengan komponen dan bobot sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja, dengan bobot 30%
2. Pengukuran Kinerja, dengan bobot 30%
3. Pelaporan Kinerja, dengan bobot 15%
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dengan bobot 25%

Tabel 12 Rincian Target dan Realisasi IKK 9 Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan	TARGET			REALISASI		
			Okt	Nov	Des	Okt	Nov	Des
IKK 9	Nilai SAKIP Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	Nilai	81	81	81	82,46	82,46	80,6

Sumber : Pusjak Sarana Transportasi, Diolah, 2023

Realisasi Nilai SAKIP Pusat Kebijakan Sarana Transportasi adalah Nilai SAKIP dari Badan Kebijakan Transportasi yang merupakan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP BKT Tahun 2023 sesuai Surat Itjen Nomor PS.307/1/1/ITJEN/2023 Tanggal 30 Agustus 2023.

Kegiatan SAKIP Pusat Kebijakan Sarana Transportasi yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Tahun 2023;
2. Penyusunan LKIP Pusat Kebijakan Sarana Transportasi TA 2022;
3. Penyusunan LKIP Triwulan I TA 2023 Pusat Kebijakan Sarana Transportasi;

4. Penyusunan LKIP Triwulan II TA 2023 Pusat Kebijakan Sarana Transportasi;
5. Penyusunan LKIP Triwulan III TA 2023 Pusat Kebijakan Sarana Transportasi
6. Penyusunan dokumen Monitoring Renaksi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Bulan Januari TA.2023;
7. Penyusunan dokumen Monitoring Renaksi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Bulan Februari TA 2023;
8. Penyusunan dokumen Monitoring Renaksi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Bulan Maret TA 2023;
9. Penyusunan dokumen Monitoring Renaksi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Bulan April TA 2023;
10. Penyusunan dokumen Monitoring Renaksi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Bulan Mei TA 2023;
11. Penyusunan dokumen Monitoring Renaksi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Bulan Junii TA 2023;
12. Penyusunan dokumen Monitoring Renaksi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Bulan Juli TA 2023;
13. Penyusunan dokumen Monitoring Renaksi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Bulan Agustus TA 2023;
14. Penyusunan dokumen Monitoring Renaksi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Bulan September TA 2023;
15. Penyusunan dokumen Monitoring Renaksi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Bulan Oktober TA 2023;
16. Penyusunan dokumen Monitoring Renaksi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Bulan November TA 2023;
17. Pengisian aplikasi e Performance Pusat Kebijakan Sarana Transportasi;
18. Penyusunan Laporan Evaluasi Akhir Periode Renstra;
19. Penyusunan Perjanjian Kinerja Revisi 1 Tahun 2023;
20. Penyusunan Renaksi Tahunan 2023.

3.4.8 Indeks Pengelolaan BMN Pusat Kebijakan Sarana Transportasi

Indeks Pengelolaan BMN Pusat Kebijakan Sarana Transportasi merupakan salah satu indikator dalam rangka mendukung kinerja reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Indeks Pengelolaan BMN Pusat Kebijakan Sarana Transportasi dihitung berdasarkan tingkat pencapaian penetapan status penggunaan (PSP) BMN dan tingkat kepatuhan pelaporan BMN (Laporan BMN Semester 1, Semester 2/Tahunan, dan Laporan Wasdal).

Penilaian Indeks Pengelolaan BMN Pusat Kebijakan Sarana Transportasi terdiri dari 2 indikator yaitu Tingkat pencapaian BMN yang dilakukan Penetapan Status Penggunaannya (PSP) (50%) dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan terkait BMN (50%).

Nilai Pengelolaan BMN Pusat Kebijakan Sarana Transportasi mengacu nilai Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi karena pengelolaan BMN di Kelola oleh Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.

Tabel 13 Rincian Target dan Realisasi IKK 10 Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan	TARGET			REALISASI		
			Okt	Nov	Des	Okt	Nov	Des
IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	Nilai	63,3	69,67	76	100	100	100

Sumber : Pusjak Sarana Transportasi, Diolah, 2023

Kegiatan IKK 10 yang telah di dilaksanakan sampai akhir Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan CaLBMN Tahunan TA 2022 Badan Kebijakan Transportasi;
2. Penyusunan Laporan Wasdal Semester 2 Tahun 2022 Badan Kebijakan Transportasi;
3. Penyusunan Laporan Wasdal Tahunan 2023 Badan Kebijakan Transportasi;
4. Penyusunan Laporan BMN Semester 2 Tahun Anggaran 2022;
5. Penyusunan Laporan BMN Semester 1 Tahun Anggaran 2023;
6. Rapat Finalisasi Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 1156 Tahun 2023 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.

3.4.9 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Pusat Kebijakan Sarana Transportasi

IKK 11 merupakan Kegiatan pengembangan kemitraan dalam negeri dan kerjasama luar negeri di bidang perumusan rekomendasi kebijakan transportasi. Cara menghitung kualitas pelaksanaan Kerjasama adalah jumlah tindak lanjut perjanjian Kerjasama di bagi jumlah total Kerjasama di kalikan 100%.

Tabel 14 Rincian Target dan Realisasi IKK 11 Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan	TARGET			REALISASI		
			Okt	Nov	Des	Okt	Nov	Des

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan	TARGET			REALISASI		
			Okt	Nov	Des	Okt	Nov	Des
IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	Nilai	86	86	86	50	33	100

Sumber : Pusjak Sarana Transportasi, Diolah, 2023

Sampai akhir Tahun 2023 telah dilaksanakan beberapa kegiatan Kerjasama diantaranya :

1. Penandatanganan perjanjian Kerjasama dengan PT.PAL
2. Penandatanganan MoU dengan Universitas Hasanuddin Makassar.

3.4.10 Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Pusat Kebijakan Sarana Transportasi

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai Badan Kebijakan Transportasi

Pelaksanaan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi merupakan ujung tombak dalam pelayanan prima pada stakeholders (Pimpinan dan pegawai) di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi

Sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Umum, lingkup penyelenggaraan perkantoran meliputi aspek K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja) di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Umum sebagaimana dijelaskan dalam PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%).

Tabel 15 Rincian Target dan Realisasi IKK 12 Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan	TARGET			REALISASI		
			Okt	Nov	Des	Okt	Nov	Des
IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	Nilai	73	73	73	80,3	80,3	78,94

Sumber : Pusjak Sarana Transportasi, Diolah, 2023

Nilai Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Pusat Kebijakan Sarana Transportasi di dapat dari Nilai Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Badan Kebijakan Transportasi. Kegiatan yang telah di lakukan pada IKK 12 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan layanan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
2. Pengisian Kuesioner Pengukuran kualitas penyelenggaraan layanan perkantoran
3. Telah dilaksanakan Survey Penyelenggaraan layanan perkantoran melalui <https://e-survey.dephub.go.id>. Hasil Survey sampai dengan Triwulan IV dan diperoleh responden sebanyak 473 Responden dengan komposisi 445 Orang Non Pegawai Kemenhub, 9 Pegawai BKT, 4 Pegawai BPSDM, dan 15 Pegawai Unit Kerja lain.

3.5 Analisis Sumber Daya Keuangan dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023, Pagu Anggaran Pusat Kebijakan Sarana Transportasi sebesar Rp. 22.006.719.000,00. Sampai dengan akhir Tahun 2023 realisasi anggaran sebesar Rp. 21.994.905,00 atau 99,95% dibandingkan dengan total anggaran. Secara rinci tingkat penyerapan anggaran per bulan disampaikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 16 Rencana dan Realisasi Anggaran

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	TK (Tingkat Penyerapan)
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	22.006.719.000,00	21.994.905.445,00	99,95%
Belanja Modal	-	-	-
Total	22.006.719.000,00	21.994.905.445,00	99,95%

Sumber: Aplikasi SMART (<http://monev.anggaran.depkeu.go.id>)

Anggaran Pusat Kebijakan Sarana Transportasi pada Tahun 2023 dalam mendukung ketercapaian IKK secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 17 Rincian Output dan Anggaran IKK Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	PAGU	Volume	TARGET		Realisasi Anggaran TA 2023 (Rp)
			Kinerja	Anggaran (Rp)	
IKK 1 Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan pembangunan transportasi	8.285.141.000	13 RK	85%	8.285.141.000	8.283.796.130

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		PAGU	Volume	TARGET		Realisasi Anggaran TA 2023 (Rp)
				Kinerja	Anggaran (Rp)	
IKK 2	Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan pembangunan transportasi (t-2)	-		38%	-	0
IKK 3	Persentase pemanfaatan rekomendasi rumusan NSPK	512.508.000	1 RK	85%	512.508.000	512.483.808
IKK 4	Persentase pemanfaatan rekomendasi rumusan NSPK (t-2)	-	-	32%	-	0
IKK 5	Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang di selaraskan pada tahun berjalan	9.218.487.000	1	100%	9.218.487.000	9.218.436.568
IKK 6	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	147.000.000	1	Nilai 3	147.000.000	146.828.615
IKK 7	Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi	789.451.000	1	Nilai 84	789.451.000	788.671.941
IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi	200.000.000	1	Nilai 88,2	200.000.000	197.448.913
IKK 9	Nilai SAKIP BKT	235.000.000	1	Nilai 81	235.000.000	234.970.860
IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi	100.000.000	1	Nilai 76	100.000.000	97.250.957
IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi	200.000.000	1	86%	200.000.000	199.500.000
IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	2.319.132.000	1	Nilai 73	2.319.132.000	2.315.517.649

Sumber : Pusjak Sarana Transportasi, Diolah, 2023

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja pada Tahun 2023 serta sebagai langkah upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi.

Pencapaian kinerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi telah menggunakan target berbasis *outcome* yang telah sesuai dengan konsep Rencana Strategis 2023 – 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi pada Triwulan IV Tahun 2023 dibandingkan target tahunan pada tahun 2023 sebesar 111,86%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 18 Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 dibandingkan Target
PK Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Realisasi TA 2023	Capaian Kinerja (%)	
IKK 1	Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan pembangunan transportasi	%	85	100	117,65%
IKK 2	Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan pembangunan transportasi (t-2)	%	38	40	105,26%
IKK 3	Persentase pemanfaatan rekomendasi rumusan NSPK	%	85	100	117,65%
IKK 4	Persentase pemanfaatan rekomendasi rumusan NSPK (t-2)	%	32	-	NA
IKK 5	Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang di selaraskan pada tahun berjalan	%	100	100	100%
IKK 6	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3	3	100%
IKK 7	Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	84	100	119,05%
IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	88,2	100	113,28%

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target	Realisasi TA 2023	Capaian Kinerja (%)
IKK 9	Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi	Nilai	81	80,8	99,75%
IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	76	100	131,58%
IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi	%	86	100	116,28%
IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	73	80,3	110%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)					111,86%

Sumber : Pusjak Sarana Transportasi, Diolah, 2023

Kunci keberhasilan dalam pencapaian kinerja yaitu adanya implementasi manajemen kinerja yang baik melalui pengaturan kerjasama secara harmonis dan terintegrasi antara pimpinan dan pelaksana, serta pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal guna mencapai target kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2023, Pagu Anggaran Pusat Kebijakan Sarana Transportasi sebesar Rp. 22.006.719.000,00. Sampai dengan akhir Tahun 2023 realisasi anggaran sebesar Rp. 21.994.905,00 atau 99,95% dibandingkan dengan total anggaran. Secara rinci tingkat penyerapan anggaran per bulan disampaikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 19 Rencana dan Realisasi Anggaran

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	TK (Tingkat Penyerapan)
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	22.006.719.000,00	21.994.905.445,00	99,95%
Belanja Modal	-	-	-
Total	22.006.719.000,00	21.994.905.445,00	99,95%

Sumber: Aplikasi SMART (<http://monev.anggaran.depkeu.go.id>)

4.2. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi pada Triwulan III Tahun 2023, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti di Tahun 2023 seperti :

1. Perlunya pembuatan sistem kontrol pelaporan dan kinerja serta dokumentasi secara digital dan *online*, untuk mendukung kegiatan strategis maupun untuk kegiatan rutin di luar penyusunan rekomendasi kebijakan.
2. Perlunya kontrol terhadap setiap tahapan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan, sehingga penyusunan rekomendasi kebijakan dapat dilaksanakan secara runut dan sesuai dengan tahapan tahapan yang telah di sepakati.
3. Perlu adanya pengendalian terhadap penyerapan daya serap, khususnya untuk kegiatan yang akan dibatalkan, atau untuk dilakukan penyesesuain judul kegiatan yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (Modul 1-5). 2000. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jakarta.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Ketetapan MPR-RI Nomor.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sekretariat MPR RI, Jakarta.
- Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 1999. Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta.
- Pedoman dan Modul Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 2003. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jakarta.
- Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 2004. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LAMPIRAN

Lampiran 1

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DALAM RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2020 - 2024**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	META INDIKATOR	TARGET						
				2020	2021	2022	2023	2024		
SK1	Optimalnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan bidang transportasi LSDP	<i>Initial</i>								
		IKK 1	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi	%	Prosentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi yang diterima oleh Menteri, Sub Sektor Perhubungan, dan stakeholders	75	75	80	85	90
		<i>Intermediate</i>								
		IKK 2	Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan di bidang transportasi pada (t-2)	%	Prosentase rekomendasi kebijakan bidang transportasi pada (t-2) yang diterima dan dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan, Sub Sektor Perhubungan, dan stakeholders	35	36	37	38	39
		<i>Initial</i>								
		IKK 3	Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang transportasi	%	Prosentase rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang transportasi yang diterima oleh Menteri, sub sektor Perhubungan, dan stakeholders	75	75	80	85	90
		<i>Intermediate</i>								
		IKK 4	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Transportasi	%	Prosentase rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang transportasi yang dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan, Sub Sektor Perhubungan, dan stakeholders	30	30	30	32	32
		<i>Initial</i>								
		IKK 5	Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan&dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya bidang transportasi	%	Persentase rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya Bidang transportasi yang diterima oleh Menteri Perhubungan dan Sub Sektor Perhubungan	75	75	80	85	90

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	META INDIKATOR	TARGET						
				2020	2021	2022	2023	2024		
			<i>Intermediate</i>							
	IKK 6		Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya bidang transportasi pada t-2	%	Persentase rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya Bidang transportasi yang dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan dan Sub Sektor Perhubungan pada t-2	30	31	32	33	34
SK 2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi LSDP	IKK 7	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	%	Persentase penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi yang dilaksanakan sesuai dengan rencana	80	80	85	85	90
		IKK 8	Tingkat Maturitas SPIP	Indeks	Penilaian BPKP	3	3	3	3	3

Lampiran 2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET
SK 1	Optimalnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	IKK 1	<i>Initial Outcome</i> Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi	%	80
		IKK 2	<i>Intermediate Outcome</i> Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi pada (t-2)	%	37
		IKK 3	<i>Initial Outcome</i> Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Transportasi	%	80
		IKK 4	<i>Intermediate Outcome</i> Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Transportasi	%	30
		IKK 5	<i>Initial Outcome</i> Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusiannya bidang transportasi	%	80
		IKK 6	<i>Intermediate Outcome</i> Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusiannya bidang transportasi pada t-2	%	32
SK 2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi LSDP	IKK 7	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	%	85
		IKK 8	Tingkat Maturitas SPIP	Indeks	3

